

PREFERENSI PEMILIH KRITIS TERHADAP SISTEM PEMILU

**Update Temuan Survei Telepon Nasional:
2 – 5 Mei 2023**

Latar Belakang

- Sistem proporsional terbuka telah diterapkan dalam pemilihan umum (pemilu) di negara kita sejak 2004 hingga 2019.
- Dalam pemilu dengan sistem proporsional terbuka, warga memilih partai dan/atau calon, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih/rakyat secara langsung, bukan oleh pimpinan partai.
- Namun dalam beberapa waktu terakhir muncul gagasan untuk menerapkan sistem proporsional tertutup, di mana dalam pemilu warga hanya memilih partai, sementara calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pimpinan partai, bukan oleh pemilih/rakyat langsung.
- Bagaimana preferensi warga terhadap sistem pemilu? Sistem mana yang lebih diinginkan oleh warga pada umumnya, proporsional terbuka atau tertutup?

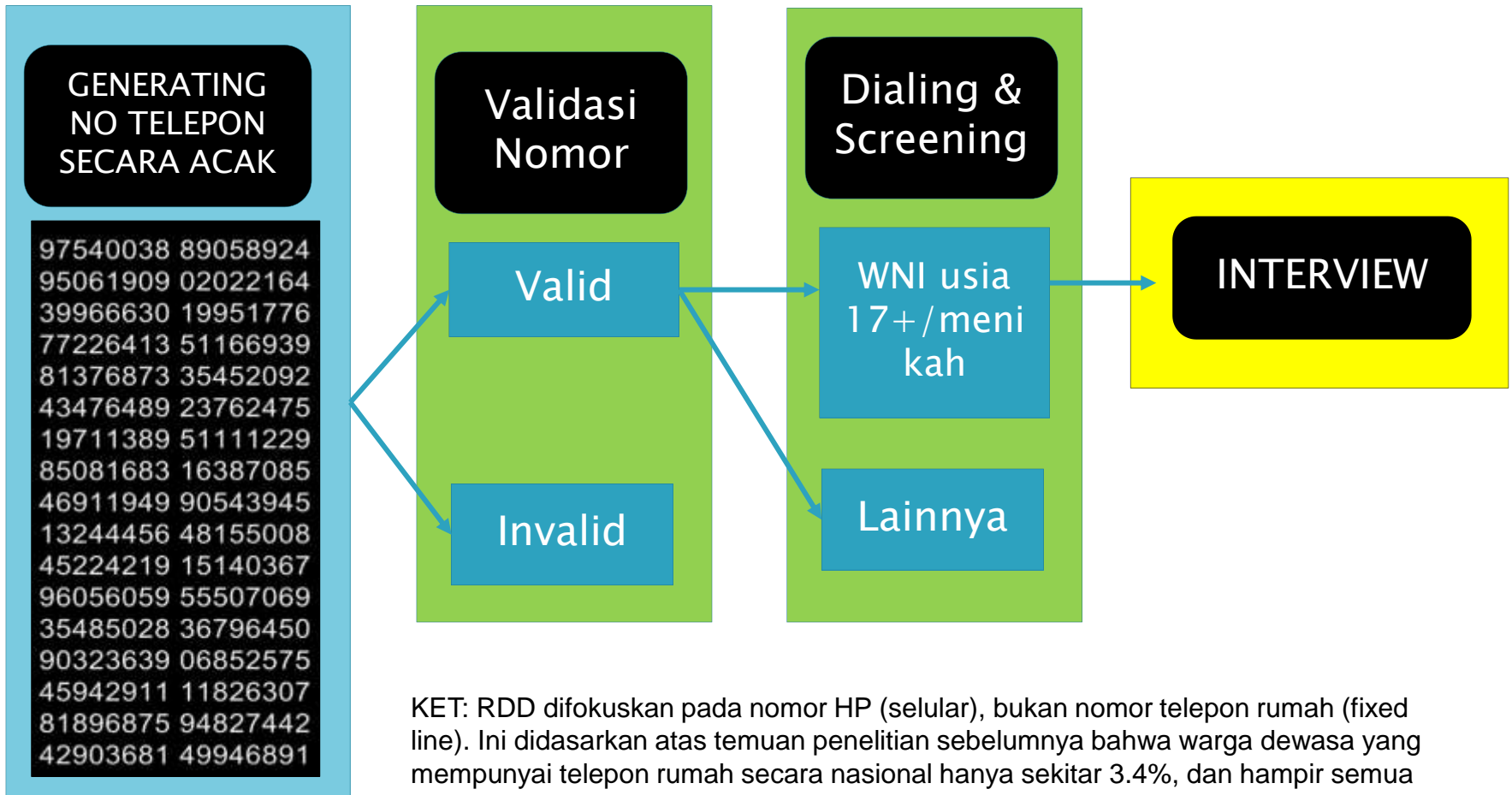
Latar Belakang

- Salah satu kelompok warga yang penting jadi perhatian adalah pemilih kritis. Pemilih kritis pada umumnya tidak mudah goyah atau dipengaruhi, dan sebaliknya bisa mempengaruhi pemilih lain.
- Pemilih yang memiliki telepon/cellphone merupakan indikasi kelompok pemilih kritis. Mereka cenderung punya kesempatan lebih besar untuk mendapat informasi sosial-politik dibanding yang tidak punya telepon/cellphone, dan karena itu kritis dalam menilai berbagai persoalan.
- Bagaimana preferensi pemilih kritis terhadap sistem pemilu kita?
- Untuk menjawab pertanyaan tersebut SMRC melakukan serangkaian survei nasional lewat telepon yang diupdate terakhir pada 2–5 Mei 2023. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 80% dari total populasi nasional.

Metodologi Survei Telepon

- Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
- Dengan teknik RDD sampel sebanyak 925 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan $\pm 3.3\%$ pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.
- Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.
- Survei terakhir dilakukan pada 2 – 5 Mei 2023.

Proses random digit dialing



Response Rate

Random Digit Dialing

Waktu survei	Total nomor telepon yang dikontak (dialed) [A]	Total pemilik telepon yang mengaku WNI usia 17+ / menikah [B]	Jumlah Responden yang berhasil diwawancarai [C]
10–13 Januari 2023	22,770	2,904	1,208
14–17 Februari 2023	22,684	2,964	947
2–5 Mei 2023	18,343	2,098	925

Margin of Error

- Dengan sampel 925 responden, margin of error survei diperkirakan +/-3.3% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.
- Margin of error (moe) dalam laporan ini merupakan perkiraan simpangan statistik proporsi dari nilai yang sebenarnya untuk kondisi statistik proporsi (\hat{p}) dengan *standard error* maksimum (yakni ketika $\hat{p} = 50\%$) pada tingkat kepercayaan 95% dan asumsi simple random sampling.
- Moe tersebut berguna untuk interpretasi hasil sebagai berikut:
 - Moe secara nasional diperkirakan +/-3.3%. Artinya bila estimasi suatu proporsi secara nasional bernilai 50% maka nilai yang sebenarnya diperkirakan $50\% \pm 3.3\%$ (46.7% - 53.3%) pada tingkat kepercayaan 95%.
- Moe pada dasarnya tidak bersifat unik, karena ia merupakan fungsi dari proporsi \hat{p} dan ukuran sampel n . Moe terbesar adalah ketika $\hat{p} = 50\%$. Semakin jauh \hat{p} dari 50% (\hat{p} mendekati 0 atau mendekati 100%), semakin kecil moe-nya. Maka moe untuk masing-masing proporsi harus dihitung sendiri-sendiri.
- Namun demikian, karena moe yang dinyatakan dalam laporan ini merupakan moe terbesar, maka moe tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk interpretasi hasil. Misalkan secara nasional diperkirakan 52% warga setuju terhadap suatu isu sedangkan 48% tidak setuju, maka dapat diperkirakan bahwa proporsi yang setuju dan tidak setuju tersebut tidak berbeda signifikan karena selisihnya ($52\% - 48\% = 4\%$) kurang dari $2 \times moe$, yakni kurang dari 6.6% ($= 2 \times 3.3\%$). Sedangkan bila yang setuju 60% dan tidak setuju 40% (selisih 20%), maka perbedaan tersebut signifikan.

Validasi Sampel dan Pembobotan Data

- Untuk mendapatkan sampel yang proporsional dari responden yang memiliki telepon tersebut terhadap karakteristik populasi dilakukan pembobotan terhadap sampel terpilih.
- Sampel hasil survei divalidasi dengan membandingkan komposisi demografi sampel dan populasi hasil sensus BPS. Demografi tersebut meliputi, provinsi, gender, desa-kota, umur, etnis, dan agama.
- Bila ada perbedaan signifikan antara demografi sampel dan populasi, maka dilakukan pembobotan data sedemikian rupa sehingga komposisi demografi sampel menjadi proporsional terhadap populasi.

PROFIL RESPONDEN

Profil Demografi Sampel Dibanding Populasi

KATEGORI	POPULASI	SAMPEL ASLI	SAMPEL DIBOBOT
GENDER			
Laki-Laki	50.6	64.4	50.6
Perempuan	49.4	35.6	49.4
DESA-KOTA			
Pedesaan	50.2	37.3	50.2
Perkotaan	49.8	62.7	49.8
UMUR			
<= 25 thn	22.8	32.4	22.9
26-40 thn	37.0	49.4	37.1
41-55 thn	25.0	15.0	25.0
> 55 thn	15.2	3.1	15.0
PENDIDIKAN			
<= SD	37.0	8.6	36.6
SLTP	18.0	10.1	18.0
SLTA	31.2	54.1	31.0
PT	13.7	26.8	13.6
TIDAK JAWAB		0.4	0.9

KATEGORI	POPULASI	SAMPEL ASLI	SAMPEL DIBOBOT
AGAMA			
Islam	87.5	85.9	87.5
Protestan/Katolik	9.9	11.0	9.9
Lainnya	2.6	3.0	2.5
ETNIS			
Jawa	40.2	38.5	40.3
Sunda	15.5	19.2	15.4
Batak	3.6	3.8	3.5
Madura	3.0	2.6	3.0
Betawi	2.9	4.2	2.9
Bugis	2.7	4.4	2.7
Minang	2.7	2.7	2.7
Lainnya	29.4	24.5	29.6

...Lanjutan: Perbandingan Profil Demografi

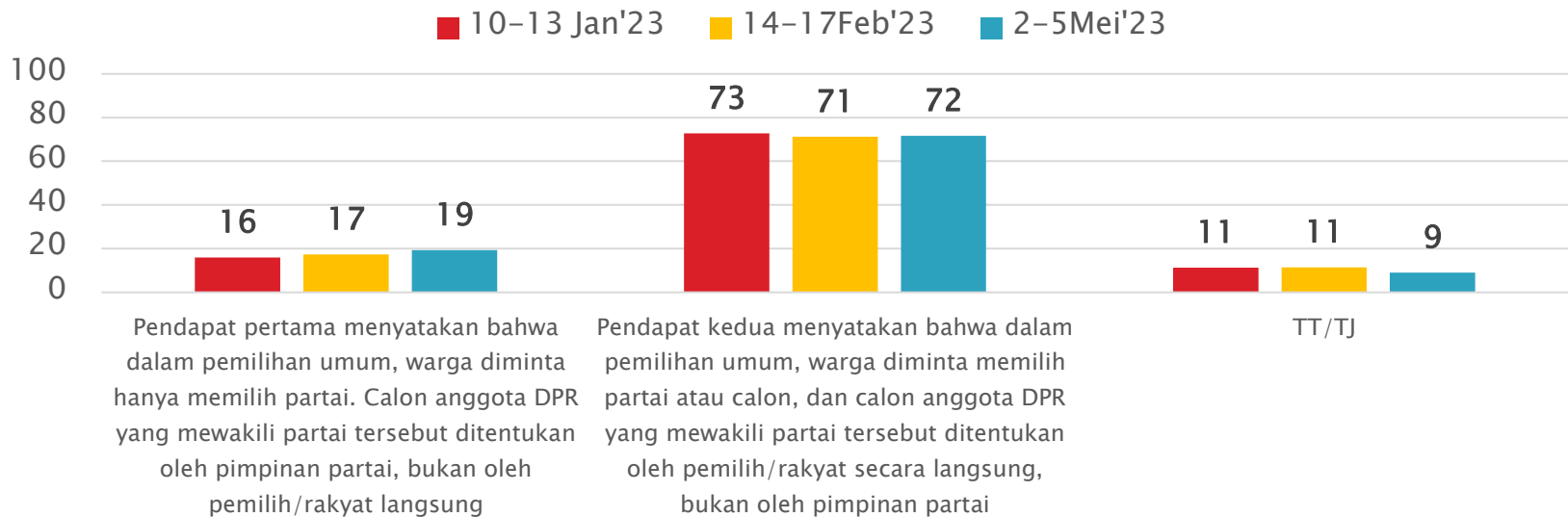
KATEGORI	POPULASI	SAMPEL ASLI	SAMPEL DIBOBOT
PROVINSI			
Aceh	1.8	1.8	1.8
Sumatera Utara	5.1	3.4	5.1
Sumatera Barat	1.9	2.4	1.9
Riau	2.0	2.2	2.0
Jambi	1.3	2.1	1.3
Sumatera Selatan	3.1	2.5	3.1
Bengkulu	0.7	0.5	0.7
Lampung	3.2	4.1	3.2
Kep Bangka Belitung	0.5	0.4	0.5
Kepulauan Riau	0.6	1.7	0.6
DKI Jakarta	4.1	6.2	4.1
Jawa Barat	17.4	19.2	17.4
Jawa Tengah	14.6	13.4	14.6
DI Yogyakarta	1.4	1.6	1.4
Jawa Timur	16.2	13.0	16.2
Banten	4.3	6.3	4.3
Bali	1.6	2.3	1.6

KATEGORI	POPULASI	SAMPEL ASLI	SAMPEL DIBOBOT
PROVINSI			
NTB	1.9	1.1	1.9
NTT	1.8	2.1	1.8
Kalimantan Barat	1.9	1.6	1.9
Kalimantan Tengah	0.9	0.9	0.9
Kalimantan Selatan	1.5	1.0	1.5
Kalimantan Timur	1.3	1.5	1.3
Kalimantan Utara	0.2	0.2	0.2
Sulawesi Utara	1.0	1.2	1.0
Sulawesi Tengah	1.0	0.9	1.0
Sulawesi Selatan	3.2	2.2	3.2
Sulawesi Tenggara	0.9	1.2	0.9
Gorontalo	0.4	0.3	0.4
Sulawesi Barat	0.5	0.5	0.5
Maluku	0.7	1.2	0.7
Maluku Utara	0.4	0.4	0.4
Papua Barat	0.4	0.1	0.4
Papua	1.9	0.6	1.9

Preferensi terhadap Sistem Pemilu

Pemilu Memilih Partai Saja atau Partai dan Calon?

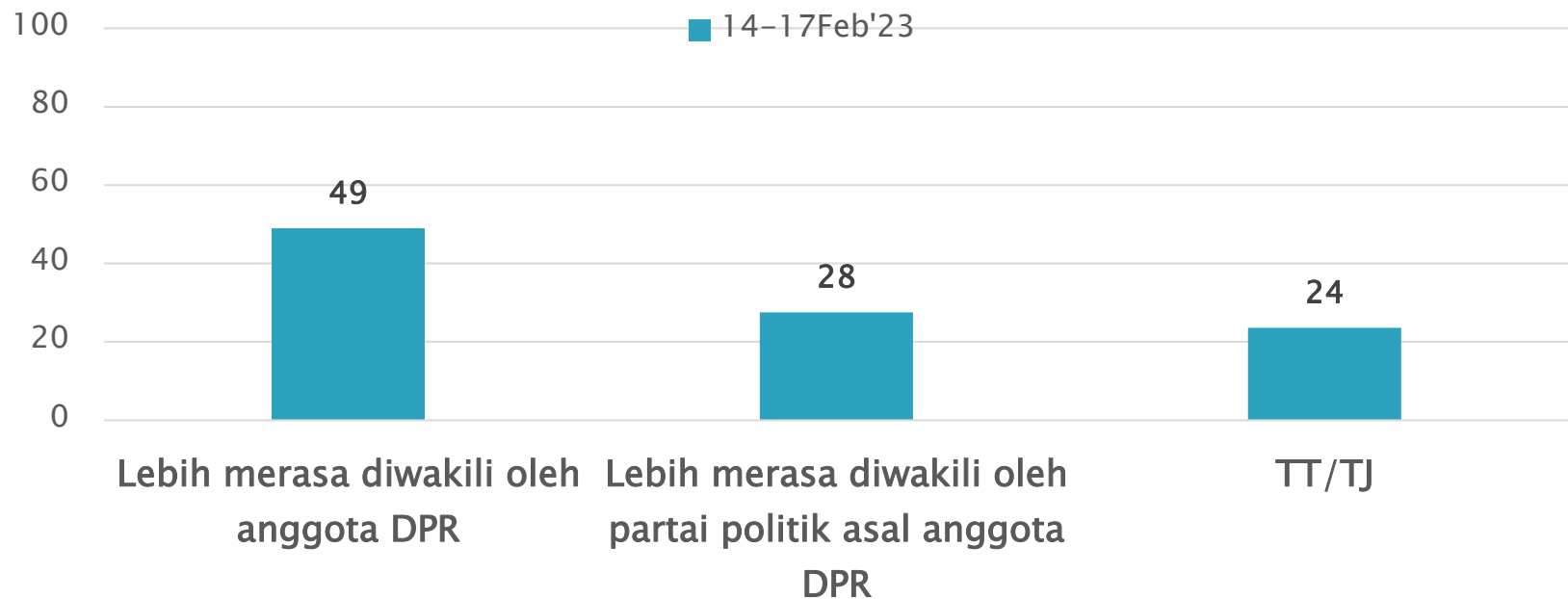
Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang sedang dibahas Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan tersebut ada dua pendapat berbeda: Pendapat pertama menyatakan bahwa dalam pemilihan umum, warga diminta hanya memilih partai. Calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pimpinan partai, bukan oleh pemilih/rakyat langsung. Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa dalam pemilihan umum, warga diminta memilih partai atau calon, dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih/rakyat secara langsung, bukan oleh pimpinan partai. Pendapat mana yang Ibu/Bapak setuju? ... (%)



Mayoritas warga, 72%, lebih setuju pada pendapat kedua: dalam pemilihan umum, warga diminta memilih partai atau calon, dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih/rakyat secara langsung, bukan oleh pimpinan partai.

Lebih Terwakili Anggota DPR atau Parpol asal Anggota DPR?

Sebagai pemilih dalam pemilihan anggota DPR, apakah Ibu/Bapak lebih merasa diwakili oleh orang yang Ibu/Bapak pilih sebagai anggota DPR atau lebih merasa diwakili oleh partai politik asal anggota DPR tersebut? ... %



Ada 49% yang lebih merasa diwakili oleh orang yang dipilih sebagai anggota DPR, sementara yang lebih merasa diwakili oleh partai politik asal anggota DPR tersebut ada 28%.

Preferensi terhadap Sistem Pemilu Menurut Pemilih Partai

Gabungan survei telepon Jan–Mei 2023 (N=3080)

	BASE	Pendapat 1: Warga hanya memilih partai, Calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pimpinan partai	Pendapat 2: Warga memilih partai atau calon, dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih/rakyat secara langsung	TT/TJ
PEMILIH PARTAI				
PKB	4.6	23	74	3
Gerindra	11.9	24	72	4
PDI Perjuangan	18.2	20	73	7
Golkar	8.1	17	69	14
Nasdem	4.8	20	78	2
PKS	4.6	13	86	1
PPP	1.7	29	70	1
PAN	1.1	33	62	6
Demokrat	5.9	17	82	1
Lainnya	6.7	21	75	4
TT/TJ	32.5	12	67	22

Mayoritas pemilih dari setiap partai lebih menginginkan sistem proporsional terbuka: memilih partai atau calon, dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan langsung oleh pemilih/rakyat.

Preferensi terhadap Sistem Pemilu Menurut Demografi

Gabungan survei telepon Jan–Mei 2023 (N=3080)

	BASE	Pendapat 1: Warga hanya memilih partai, Calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pimpinan partai	Pendapat 2: Warga memilih partai atau calon, dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih/rakyat secara langsung	TT/TJ
GENDER				
Laki-Laki	50.6	19	73	8
Perempuan	49.4	15	71	14
DESA-KOTA				
Pedesaan	50.2	18	71	11
Perkotaan	49.8	17	73	10
UMUR				
<= 25 thn	22.8	19	74	6
26-40 thn	37.1	17	76	7
41-55 thn	25.0	14	73	13
> 55 thn	15.1	21	57	23
PENDIDIKAN				
<= SD	36.7	19	63	17
SLTP	18.0	15	75	10
SLTA	31.1	15	79	6
PT	13.7	20	77	3

Mayoritas warga dari setiap segmen gender, desa-kota, usia dan pendidikan lebih menginginkan sistem proporsional terbuka: memilih partai atau calon, dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan langsung oleh pemilih/rakyat.

Preferensi terhadap Sistem Pemilu Menurut Demografi dan Wilayah

Gabungan survei telepon Jan–Mei 2023 (N=3080)

	BASE	Pendapat 1: Warga hanya memilih partai, Calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pimpinan partai	Pendapat 2: Warga memilih partai atau calon, dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih/rakyat secara langsung	TT/TJ
AGAMA				
Islam	87.6	17	72	11
Lainnya	12.4	23	70	8
ETNIS				
Jawa	40.2	14	73	12
Sunda	15.5	22	70	8
Batak	3.6	20	76	5
Madura	3.0	19	69	12
Betawi	2.9	14	82	3
Bugis	2.7	21	72	7
Minang	2.7	18	79	3
Lainnya	29.5	19	69	12
WILAYAH				
Sumatera	20.4	19	69	12
DKI+Banten	8.3	18	75	7
Jabar	17.4	21	69	10
Jateng+DIY	16.1	11	81	8
Jatim	16.2	17	66	17
Lainnya	21.6	18	73	9

Mayoritas warga dari setiap latar belakang agama, etnis dan wilayah lebih menginginkan sistem proporsional terbuka: memilih partai atau calon, dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan langsung oleh pemilih/rakyat.

Kesimpulan

Kesimpulan

- ▶ Dalam survei terakhir pada pemilih kritis, 2–5 Mei 2023, mayoritas warga, 72%, lebih menginginkan sistem pemilu di mana warga memilih partai atau calon, dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih/rakyat secara langsung, bukan oleh pimpinan partai (sistem proporsional terbuka).
- ▶ Warga yang menginginkan hanya memilih partai dalam pemilu, dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pimpinan partai (sistem proporsional tertutup) hanya 19%.
- ▶ Sementara yang tidak punya sikap ada 9%.

Kesimpulan

- ▶ Sikap mayoritas warga yang menginginkan sistem pemilu proporsional terbuka ini konsisten dalam 3 kali survei (Januari 2023, Februari 2023, dan Mei 2023). Yang menginginkan sistem proporsional terbuka sekitar 71–73%, jauh lebih banyak dibanding yang menginginkan proporsional tertutup, 16–19%.
- ▶ Keinginan warga ini sejalan dengan temuan selanjutnya bahwa lebih banyak warga (49%) yang lebih merasa diwakili oleh orang yang dipilih sebagai anggota DPR dibanding partai politik asal anggota DPR tersebut (28%).

Kesimpulan

- ▶ Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan aspirasi mayoritas di setiap massa pemilih partai, termasuk pada massa pemilih PDIP (73%).
- ▶ Langkah PDIP mengusulkan sistem pemilu proporsional tertutup tampaknya bertentangan dengan aspirasi mayoritas pemilihnya yang lebih menginginkan sistem proporsional terbuka.
- ▶ Lebih jauh, sistem pemilu proporsional terbuka juga diinginkan oleh mayoritas warga di setiap lapisan demografi dan wilayah.

Terima Kasih